



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)

UNIT KERJA : BALAI BESAR MKG WILAYAH IV - MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRWAN SLAMET
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
3. NHK : 740526

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 7.930.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/100 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 1.680 m2 di KAB / KOTA BATANG, Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 1.795 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, Rp. 700.000.000
4. Tanah Seluas 2.005 m2 di KAB / KOTA BATANG, Rp. 700.000.000
5. Tanah Seluas 1.420 m2 di KAB / KOTA BATANG, Rp. 700.000.000
6. Tanah Seluas 1.666 m2 di KAB / KOTA BATANG, Rp. 700.000.000
7. Tanah Seluas 1.568 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, Rp. 800.000.000
8. Tanah Seluas 1.640 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, Rp. 800.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/150 m2 di KAB / KOTA BATANG, Rp. 800.000.000
10. Tanah Seluas 25 m2 di KAB / KOTA BATANG, Rp. 30.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 73.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.



18.000.000

3. MOTOR, HONDA K45R Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

37.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 125.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.250.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. 890.000.000

Sub Total

Rp. 10.268.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 10.268.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.